

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum**

Tinjauan pustaka berisi fakta yang diambil dari sumber asli, dimana sumber asli yang digunakan harus mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan. Tinjauan pustaka berisi minimal 3 pustaka, namun semakin banyak akan semakin baik. Fungsi dari tinjauan pustaka juga untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam penelitian ini tinjauan pustaka akan membahas beberapa beberapa teori yang digunakan. Teori yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Mangkunegara (2008) dalam Azizah (2018) menyebutkan bahwa Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Sedangkan SOP menurut Moekijat (2008) adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

#### **2.2 Penelitian Terdahulu**

##### **2.2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Azizah pada tahun 2018 telah melakukan penelitian untuk Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam

Indonesia dengan judul “Analisis Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 IN 1”. Pada penelitian tersebut dilakukan pengkajian tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Di Indonesia, pedoman mengenai SMK3 diatur dalam suatu peraturan yaitu dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER. 05/MEN/1996.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana gambaran dari pelaksanaan SMK3 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 berdasar Permenaker No.05/MEN/1996. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis. Sedangkan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan interview atau wawancara tidak terstruktur yang bermaksud untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan SMK3 di proyek terkait. Data mengenai SMK3 yang diperoleh kemudian dibahas dan dibandingkan dengan Permenaker No.05/MEN/1996.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa SMK3 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Permenaker No.05/MEN/1996. Namun karena adanya beberapa faktor menyebabkan penerapan SMK3 kurang maksimal, sehingga diperlukan peningkatan penerapan SMK3 di lapangan untuk meminimalisir kecelakaan kerja pada lokasi proyek konstruksi.

Kurniawan pada tahun 2015 telah melakukan penelitian untuk Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dengan judul “Tingkat Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi, Studi Kasus di Kota Semarang”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara observasi, metode ini lebih cenderung pada hasil yang deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen yang berasal dari peraturan menteri PU No. 9 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan pada proyek konstruksi di kota Semarang, yaitu proyek dengan resiko tinggi dan proyek resiko sedang.

Hasil penelitian adalah tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi resiko tinggi sebesar 83,43%. Untuk hasil penelitian tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi resiko sedang sebesar 42,12%. Adapun kelengkapan fasilitas K3 pada proyek resiko tinggi sebesar 75%. Untuk kelengkapan fasilitas K3 pada proyek resiko sedang sebesar 30%.

Simpulan penelitian ini adalah tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi resiko tinggi termasuk pada kategori sedang, dan tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi resiko sedang termasuk pada kategori buruk. Untuk kelengkapan fasilitas - fasilitas K3 pada proyek resiko tinggi termasuk pada kategori sedang. Untuk kelengkapan fasilitas-fasilitas pada proyek resiko sedang termasuk dalam kategori buruk.

### 2.2.2 Standar Operasional Prosedur

Lestari pada tahun 2011 telah melakukan penelitian untuk Tugas Akhir Jurusan Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret dengan judul “Prosedur Pengelolaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Di PT Konimex *Pharmaceutical Laboratories* Sukoharjo”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana atau gambaran secara umum tentang prosedur pengelolaan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) di PT. Konimex, bagaimana pengelola menangani dokumen masuk sampai ke pemusnahannya. Jenis pengamatan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu

metode yang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan intepretasi tentang arti data itu. Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

Prosedur pengelolaan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) di PT. Konimex disusun untuk menjadi pedoman dalam menangani dokumen dan rekaman yang ditangani secara sentral maupun desentral. Prosedur pengelolaan Dokumen terdiri dari beberapa tugas pokok yaitu: Memproses permintaan Evaluasi Draft Dokumen, Memproses Persetujuan Akhir Dokumen, Menangani Penarikan Dokumen, Menangani Review Dokumen dan pemusnahan dokumen. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dokumen SOP dicatat dalam buku sesuai dengan alur tugas tersebut. Pencatatan ini dilakukan untuk memantau proses perputaran dokumen ke beberapa pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan sah dan kemudian dapat digunakan oleh bagian pembuat sebagai acuan melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan hasil pengamatan Prosedur Pengelolaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) di PT. Konimex maka dapat diambil kesimpulan bahwa Prosedur pengelolaan dokumen SOP diperlukan dalam suatu perusahaan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan sehingga perusahaan tidak tergantung pada orang tapi pada sistem yang ditetapkan. Kelancaran sebuah prosedur yang baik tidak lepas dari personil, teknologi dan faktor pendukung lainnya. Jika dalam pelaksanaan terdapat personil, teknologi, sarana dan prasarana yang sedikit maka dapat menghambat waktu proses pengelolaan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penambahan personil, teknologi (komputer) agar tidak ada kerugiaan waktu dalam prosedur pengelolaan dokumen dan tidak banyak dokumen yang menumpuk.

Andiyanto pada tahun 2017 telah melakukan penelitian untuk Publikasi Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada dengan judul “Perancangan SOP Pemilihan Pengadaan Proyek TI Menggunakan Metode *E-Purchasing* Di Biro TI BPK”.

SOP adalah instruksi tertulis tentang langkah-langkah dalam melakukan suatu pekerjaan secara spesifik, terstruktur dan sistematis. Penelitian ini

dilatarbelakangi karena belum adanya SOP mengenai pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa menggunakan metode *e-purchasing* di lingkungan Biro TI di BPK. Penelitian ini menghasilkan usulan kebutuhan SOP yang dapat membantu mendukung pelaksanaan tugas unit kerja terkait pengadaan melalui metode *e-purchasing* sehingga proses pengadaan menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Penyusunan SOP sangat bergantung pada kebutuhan dan tujuan instansi, sehingga sangat mungkin ada perbedaan format SOP dari masing-masing instansi.

SOP yang digunakan dalam lingkungan instansi pemerintah, merujuk pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Pedoman ini kemudian dijadikan acuan oleh kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah. Adapun penyusunan SOP meliputi siklus persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan SOP, Penerapan SOP, serta monitoring dan evaluasi SOP. Sedangkan prinsip pelaksanaan SOP yang baik adalah sebagai berikut.

1. SOP harus dilaksanakan secara konsisten oleh siapapun, dan dalam konsisi apapun oleh seluruh jajaran organisasai pemerintahan.
2. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran instansi, dari tingkatan yang paling rendah sampai tertinggi.
3. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan – penyempurnaan guna memperoleh prosedur yang benar – benar efisien dan efektif.
4. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.
5. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak yang memerlukan.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah usulan SOP terkait pemilihan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode *e-purchasing*. Usulan SOP ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi setiap pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara sistematis dan berurutan,

sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pekerjaan sejak dini.

Hasil rekapitulasi Penelitian Terdahulu dapat di lihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Hasil
Aristya Noor Azizah (2018)	Analisis Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 IN 1	Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa SMK3 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Permenaker No.05/MEN/1996. Namun karena adanya beberapa faktor menyebabkan penerapan SMK3 kurang maksimal, sehingga diperlukan peningkatan penerapan SMK3 di lapangan untuk meminimalisir kecelakaan kerja pada lokasi proyek konstruksi.
Yanuar Kurniawan (2015)	Tingkat Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi, Studi Kasus di Kota Semarang	Simpulan penelitian ini adalah tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi resiko tinggi termasuk pada kategori sedang, dan tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi resiko sedang termasuk pada kategori buruk. Untuk kelengkapan fasilitas-fasilitas K3 pada proyek resiko tinggi termasuk pada kategori sedang. Untuk kelengkapan fasilitas-fasilitas pada proyek resiko sedang termasuk dalam kategori buruk.
Priska Devi Lestari (2011)	Prosedur Pengelolaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Di PT. Konimex <i>Pharmaceutical Laboratories</i> Sukoharjo	Prosedur pengelolaan dokumen SOP diperlukan dalam suatu perusahaan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan sehingga perusahaan tidak tergantung pada orang tapi pada sistem yang ditetapkan. Kelancaran sebuah prosedur yang baik tidak lepas dari personil, teknologi dan faktor pendukung

Lanjutan Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil
		lainnya. Jika dalam pelaksanaan terdapat personil, teknologi, sarana dan prasarana yang sedikit maka dapat menghambat waktu proses pengelolaan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penambahan personil, teknologi (komputer) agar tidak ada kerugiaan waktu dalam prosedur pengelolaan dokumen dan tidak banyak dokumen yang menumpuk.
Bimo Hario Andiyanto (2017)	Perancangan SOP Pemilihan Pengadaan Proyek TI Menggunakan Metode <i>E-Purchasing</i> Di Biro TI BPK	Hasil dari penelitian ini adalah sebuah usulan SOP terkait pemilihan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode <i>e-purchasing</i> . Usulan SOP ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi setiap pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara sistematis dan berurutan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pekerjaan sejak dini.

### 2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bagian penting tidak hanya dalam proyek konstruksi melainkan dalam bidang lainnya yang bertujuan agar suatu pekerjaan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana serta minim resiko. SOP bertujuan agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan metode yang paling

efektif dari segi tenaga, biaya, dan waktu. Sedangkan SMK3 bertujuan agar resiko yang ditimbulkan oleh suatu pekerjaan tersebut menjadi kecil atau bahkan tidak ada.

Berdasarkan penelitian terdahulu juga maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu lebih memfokuskan analisis pada salah satu diantara SMK3 dan SOP saja, serta untuk SOP belum dianalisis pada proyek konstruksi. Pada penelitian ini, akan dicoba untuk membuat gabungan antara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Standar Operasional Prosedur serta Prosedur mutu. Perbedaan lainnya adalah objek penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini objek penelitian dilakukan pada pekerjaan pembuatan dinding penahan tanah yang terdapat pada salah satu proyek yang ada di Kota Jambi yaitu proyek Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi.

